

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Jiwasraya merupakan suatu sistem yang dapat menjelaskan distribusi antara hak-hak dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai pemangku kepentingan. Struktur Tata Kelola Perusahaan juga menjelaskan aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua, tujuan Perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan praktik Perusahaan yang mengacu pada mekanisme dan struktur yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja Perusahaan. Praktik ini mencakup praktik bisnis, aturan main, struktur proses, dan prinsip yang dimiliki.

Dalam penerapan GCG, Jiwasraya senantiasa berpegang pada prinsip GCG yang diadopsi dari Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), yakni dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran.

GCG dalam Perusahaan mendorong terciptanya usaha yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggung jawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum yang berimplikasi pada kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.

Dalam tata kelola yang baik, Perusahaan mengakui hak stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (mutual agreements) dan mendukung secara aktif kerjasama antara Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang berkesinambungan (sustainability) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan.

Penerapan GCG Perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan,

CORPORATE GOVERNANCE

For Jiwasraya, Good Corporate Governance is a system that can explain the distribution of rights and responsibilities of the Board of Commissioners, Directors, Managers, and other related stakeholders. Structure of Corporate Governance of the Company also explains the rules and procedures in decision-making and policy-making, therefore, there is an appropriate accountability on Company's objectives and performance monitoring.

Good Corporate Governance (GCG) is a Company's practice referring to the mechanisms and structure that provide control and accountability mechanism to improve the Company's performance. This practice includes the applied business practices, rules, structure, processes, and principles.

In implementing GCG, Jiwasraya always holds the principles of Good Corporate Governance adopted from that of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). It promotes the transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

GCG in the Company encourages the creation of transparent and efficient operations in line with legislation and regulations and it can clearly separate the functions and responsibilities of the authorities who are responsible for the regulation, supervision, and law enforcement. This generates implication to increase the trust of customers and stakeholders.

In good governance, the Company recognizes the rights of stakeholders based on the legislation or agreement (mutual agreements) and supports actively the cooperations between the Company and stakeholders in creating wealth, jobs, and sustainable growth (sustainability) of the financial condition of the Company reliably.

Implementation of GCG in the Company always follows to the applied laws, particularly in taxation, business competition, labor, and

<p>persaingan usaha, perburuhan, dan lingkungan.</p> <p>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan dan mempertanggung-jawabkan segala tugas dan kewajibannya dalam hal pengawasan, pelaksanaan dan pengelolaan Perusahaan kepada pemegang saham yang diselenggarakan satu kali dalam satu tahun. Disamping RUPS Tahunan, sesuai dengan kebutuhannya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.</p> <p>Pada tahun 2013, Jiwasraya telah menyelenggarakan RUPS Tahunan tahun 2013 pada hari Senin tanggal 29 April 2013 bertempat di Ruang Rapat Lantai 7, Kementerian Negara BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat dengan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2012. 2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012. 3. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 4. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih tahun Buku 2012 5. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2012. 6. Penetapan Gaji/Honorarium Berikut Tunjangan dan / atau Fasilitas untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2013. 7. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2013 	<p>environment.</p> <p>ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS</p> <p>Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders holds the highest authority in PT Asuransi Jiwasraya (Persero). It is where the Board of Commissionaires and the Board of Directors submit a report and take the accountability of all given duties and obligations in terms of supervision, implementation and management of the Company to the shareholders once a year . In addition to the AGM, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) can organize Extraordinary General Meeting, if needed.</p> <p>In 2013, Jiwasraya organized the 2013 Annual General Meeting on Monday, 29 April, 2013, in the Meeting Room 7th Floor, the Ministry of State-owned Enterprises, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Central Jakarta, and came up with a number of decisions as the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval on the Annual Report and Endorsement of the Financial Statements including Supervisory Report the BOC for the Fiscal Year of 2012. 2. Approval and Endorsement of Community Partnership and Community Development Program Report for the Fiscal Year of 2012. 3. Granting full release and discharge of responsibility (aquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors. 4. Approval the Use of Net Income as Recorded in 2012 Financial Report 5. Stipulation of Bonuses to the Board of Commissionaires and the Board of Directors for their Performance for the Fiscal Year of 2012 6. Stipulation of Salary / Honorarium including Allowance and / or facilities for the Board of Commissionaires and the Board of Directors for the Fiscal Year of 2013 7. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to carry out the Company's Financial Statement Audit for the Fiscal Year of 2013.
---	---

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran/ pengarahan kepada Direksi serta bertanggung jawab secara kolektif kepada pemegang saham dan memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik pada seluruh tingkatan atau jenjang.

Tugas Dewan Komisaris

Sebagai bentuk tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap pemangku kepentingan, Dewan Komisaris memiliki tugas untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah laporan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Keuangan Tahunan yang telah di Audit dan dipersiapkan oleh Direksi kemudian ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Board of Charter Dewan Komisaris

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris merujuk pada Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan.

1. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dan membentuk Komite yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan atau peraturan perundang-undangan dan atas beban Perusahaan.
2. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur dalam rapat komisaris dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commisionaires is responsible to supervise and provide advices / guidances to the Board of Directors as well as collectively responsible to the shareholders and ensuring the Company's corporate governance is implemented well at all levels.

Duties of the Board of Commissioners

As the Board of Commisionaires is responsibility to the stakeholders, the duties of the Board of Commissioners are:

1. Supervising the management policies of the Company taken by the Board of Directors and providing advices to the Board of Directors. This includes giving advices on the Company's development plan, implementation of the Annual Work Plan and Budget, implementation of the Statute and decisions of the AGM as well as the compliance to the laws and regulations by considering the interests of the Company.
2. Researching and reviewing the Long Term Corporate Plan (RJPP), the Work Plan and Budget (RKAP), and the Audited Annual Financial Report prepared by the Board of Directors before the documents are then signed by the Board of Commissioners.

Commisioners Board of Charter

The work guidance and guidelines of the Board of Commisionaires is made in line with the Statutes, applicable legislation and other regulations in accordance with the Company's business activities.

1. In order to carry out their duties, the Board of Commisionaires may request assistance from the experts for a limited period and establish the Committee to meet the needs and in line with the legislations and also at the Company's costs.
2. Distribution of duties among the members of the Board of Commisionaires is set through a commissioner meeting and, to support their works on the duties, the Board of Commissioners can appoint a secretary to

<p>3. Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya berhak meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi atau setiap anggota Direksi dan wajib diberikan penjelasan.</p> <p>4. Dewan Komisaris setiap saat berhak memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.</p> <p>Rapat Dewan Komisaris Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali, yang terdiri dari: Rapat intern Dewan Komisaris. Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Rapat antara Dewan Komisaris dengan Komite Audit.</p>	<p>assist them.</p> <p>3. The Board of Commissioners or experts who help them have the rights to require explanations about any issues from the Board of Directors or its members, and, explanation must be given.</p> <p>4. The Board of Commissioners has the rights to temporarily terminate one or more members of the Board of Directors from their positions at any time, if taking actions against the Statute and the rules and regulations or abandoning their duties or there is a compelling reason for the Company.</p> <p>The Meeting of Board of Commissionaires The Meeting of Board of Commissionaires is organized at least 1 (one) time a month. There are three types of meetings, which are: Internal Meeting of the Board of Commissioners. Meeting of the Board of Commissionaires with the Board of Directors. Meeting of the Board of Commissionaires with the Audit Committee.</p>
--	--

Table of BOC Meetings Attendance Frequency

No.	Name	Position	Number of Meetings	Total Present	(%) Attendance
1.	Djonny Wiguna	Commissioner	12	12	100
2.	Muhammad Sapta Murti	Commissioner Member	12	10	83.3
3.	Sumiyati	Commissioner Member	12	11	91.7
4.	Sumyana Sukandar	Commissioner Member	12	10	83.3

Susunan Anggota Dewan Komisaris adalah	Composition of the Board of
---	------------------------------------

<p>:</p> <p>a. Djonny Wiguna sebagai Komisaris Utama/Independen</p> <p>b. Muhammad Sapta Murti sebagai Anggota Komisaris</p> <p>c. Sumiyati sebagai Anggota Komisaris</p> <p>d. Sumyana Sukandar sebagai Anggota Komisaris</p> <p>Masa Jabatan Dewan Komisaris Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 28 ayat 4, Masa Jabatan Komisaris adalah selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali Masa Jabatan tanpa mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana tabel dibawah ini</p>	<p>Commissionaires are:</p> <p>a. Djonny Wiguna as the President Commissionaire / Independent Commissionaire</p> <p>b. Muhammad Sapta Murti as the Commissionaire</p> <p>c. Members Sumiyati as as the Commissionaire</p> <p>d. Sumyana Sukandar as as the Commissionaire</p> <p>Tenure of the Board of Commissionaires The tenure of the Board of Commissionaires based on the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2003 about the State-owned Enterprises Article 28, Paragraph 4, is 5 years and reappointment is allowed only for another period without reducing the AGM rights to dismiss the Commissionaires at any time. Tenure of each member of the Board of Commissionaires is shown in the table below</p>
---	---

NAME	POSITION	START	ENDED
Djonny Wiguna	President Commissionaire	Jan 30, 2013	2018
Muhammad Sapta Murti	Commissionaire	Nov 6, 2013	2018
Sumiyati	Commissionaire	Sep 11, 2012	2017
Sumyana Sukandar	Commissionaire	Sep 11, 2012	2017

* Decision of the Minister of SOEs Number: SK-375/MBU/2013 dated November 2013 about Termination and Appointment of the Members of Board of Commissioners of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

<p>Struktur Remunerasi Dewan Komisaris</p> <p>Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan setiap tahunnya dalam RUPS Tahunan dan disesuaikan dengan keuangan Perusahaan. Struktur Remunerasi yang menunjukkan Komponen Remunerasi dan Jumlah Nominal per Komponen untuk setiap Anggota Dewan Komisaris terdiri dari Gaji, Tunjangan, Fasilitas, dan Tantiem.</p>	<p>Remuneration Structure of the Board of Commissionaires</p> <p>Remuneration structure of the Board of Commissionaires is set by the Annual General Meeting of the Shareholders and adjusted to the financial condition of the Company. Remuneration structure indicates the Component and Amount of Remuneration for each member of the Board of Commissionaires consisting of Salaries,</p>
---	---

<p>Berdasarkan Keputusan RUPS, besaran penghasilan Dewan Komisaris berupa Honorarium, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Komunikasi, Fasilitas Asuransi Kesehatan, Santunan Purna Jabatan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tantiem selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 3.996.630.028,79</p> <p>KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS</p> <p>Komite Audit Dasar Pembentukan Komite Audit</p> <p>Dasar pembentukan Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 03/Kep.DK.0313 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jiwasraya dan Nomor: 04/Kep.DK.0513 tanggal tentang Perpanjangan Masa Tugas Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya.</p> <p>Tujuan Pembentukan Untuk lebih mengoptimalkan hasil audit dengan tetap memperhatikan prinsip prinsip <i>auditee</i> yang sehat dan hati-hati serta melibatkan lintas sektoral dalam menetapkan kebijakan.</p> <p>Keanggotaan Komite Audit Sumiyati : Ketua merangkap anggota Burdjono Simamora : Anggota Diah Anggreni S. : Anggota</p> <p>Independensi Anggota Komite Audit Untuk menjaga kemandirian atau independensi dari Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya maka 2 (dua) orang Anggota Komite Audit bukan berasal dari Komisaris atau bukan merupakan pegawai perusahaan. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Komisaris.</p>	<p>Allowances, Facilities, and Performance Bonus.</p> <p>Based on decision of the Annual General Meeting of the Shareholders, the Board of Commissionaires receives income from Honorarium, Transport Allowance, Communication Allowance, Health Insurance Facility, Post Retirement Benefits, Holiday Allowance (THR) and Bonus for 1 (one) year amounted to IDR3,996,630,028.79</p> <p>THE COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS The Audit Committee Basis to Establish the Audit Committee</p> <p>The Audit Committee is formed based on the Stipulation of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Number: 03/Kep.DK.0313 dated March 1, 2013, about Termination and Appointment of Jiwasraya Company's Audit Committee Members and Number: 04/Kep.DK.0513 about Tasks Renewal of the Audit Committee of PT Asuransi Jiwasraya (Persero)</p> <p>Objectives of Establishment To optimize the audit results while considering prudent principles of audit and involving cross-sectoral in policy setting.</p> <p>Members of rhe Audit Committee Sumiyati : Chairman and Member Burdjono Simamora : Member Anggreni Diah S. : Member</p> <p>Audit Committee Members Independency To maintain the Audit Committee independency in performing their duties and reporting, two (2) members of the Audit Committee are neither the Commissionaires nor the Company's employees. The Audit Committee is directly responsible to the board of Commissionaires.</p>
--	--

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	Description of Duties and Responsibilities
<p>Berdasarkan Keputusan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 03/Kep.DK.0313 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jiwasraya dan Nomor: 04/Kep.DK.0513 tanggal tentang Perpanjangan Masa Tugas Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya dan Audit Committee Charter tanggal 28 Desember 2009 yang sudah disesuaikan dengan ketentuan baru, Komite Audit mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi dan evaluasi/pengkajian atas hal-hal yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris. 2. Membantu Dewan Komisaris dalam mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai. 3. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal Perusahaan sebagai upaya penyempurnaan, pengendalian dan penciptaan iklim disiplin guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan. 4. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun audit eksternal dengan cara menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit Divisi Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal, sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan audit yang tidak memenuhi standar. 5. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Perusahaan serta implementasinya. 6. Memastikan bahwa prosedur review terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan telah berjalan dengan baik. 7. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas transparansi Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. 8. Mengevaluasi kecukupan dan 	<p>Based on the Stipulation of the Board of Commissionaires of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Number: 03/Kep.DK.0313 dated March 1, 2013, about the Termination and Appointment of Jiwasraya Company's Audit Committee Members and Number: 04/Kep.DK.0513 on Tasks Renewal of the Audit Committee of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) and the Audit Committee Charter dated December 28, 2009, which have been adjusted based on the latest legislation, the tasks of Audit Committee are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identification and evaluation / assessment of the aspects that are considered important by the Board of Commissionaires. 2. Supporting the Board of Commissionaires to encourage the formation of a sufficient internal control system. 3. Evaluating the Company's internal control system as the effort for improvement, controlling and ensuring the discipline in order to minimize the irregularities in managing the Company. 4. Improving the effectiveness of internal and external audit function by assessing actual implementation and the results from Internal Supervisory Unit and also the audit report of externa auditor, thus, unstandardized auditing and audit report can be prohibited. 5. Providing recommendations on the improvement of Company's internal control system and its implementation. 6. Ensuring that the procedure to review all released information by the Company has been implemented well. 7. To assist the Board of Commissionaires in providing input to improve the Company's Annual Financial Report 8. Evaluating the adequacy and accuracy

<p>ketepatan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan serta menilai pelaksanaannya.</p> <p>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.</p> <p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan review triwulanan terhadap Laporan Manajemen 2. Melakukan review triwulanan terhadap pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) 3. Melakukan review atas RKAP yang diajukan oleh Perusahaan 4. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan atas temuan BPK dan temuan Bapepam/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 5. Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris antara lain berupa penelaahan terhadap Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan Laporan Auditor Independen serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan Kantor Akuntan Publik tersebut. <p>DIREKSI</p> <p>Direksi bertugas dan bertanggung jawab mengelola PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dengan koordinasi antar tugas masing-masing Direksi sebagai berikut;</p> <p>Tugas Direktur Utama</p> <p>Memimpin pelaksanaan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.</p> <p>Menjadi koordinator dari seluruh anggota Direksi yang lain dalam melaksanakan tugas dan wewenang Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>Membawahi Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Satuan Pengawasan Intern, dan Sumber Daya Manusia, .</p> <p>Direktur Pertanggunggaan</p>	<p>of investment policies set by the Company and also assess the implementations.</p> <p>9. Conducting other duties assigned by the Board of Commissionaires under the the scope of work and obligations of the Board of Commissionaires.</p> <p>Implementation of the Duties and Responsibilities of Audit Committee for the year of 2013 is as follow:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducting reviews on Management Report quarterly 2. Conducting reviews on the activities and the audit results conducted by the Internal Audit Unit (IAU) quarterly 3. Conducting reviews on RKAP submitted by the Company 4. Conducting monitoring on the follow-up actions taken by the Company's in response to findings of BPK and Bapepam / Financial Services Authority (OJK). 5. Conducting other assignments from the Board of Commissioners including to review the public accounting firm that provides auditing services and Independent Audit Report, and to supervise the auditing work performed by the public accounting firm. <p>DIRECTORS</p> <p>Directors are in charge and responsible for managing PT Asuransi Jiwasraya (Persero) for the interests and objectives of the Company with a proper coordination among tasks of each Director as follow;</p> <p>Duties of the President Director</p> <p>Leading management of the Company for the interests and wobjectives of the Company.</p> <p>Becoming the coordinator of other Directors in carrying out the tasks and authorities of the Directors as stated in Statute.</p> <p>Supervising the Division of Corporate Secretary, Internal Audit, and Human Resources.</p> <p>Director of Insurance</p>
---	--

<p>Membawahi : Divisi Aktuaria Perusahaan Divisi Pertanggung jawaban Perorangan dan Kumpulan Divisi Program Manfaat Karyawan.</p> <p>Direktur Keuangan Membawahi : Divisi Akuntansi Divisi Keuangan dan Investasi (termasuk anak perusahaan) Divisi Umum & Pengadaan Divisi Teknologi Informasi Unit kerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Jiwasraya</p> <p>Direktur Pemasaran Membawahi : Divisi Pemasaran Divisi Penjualan Divisi Keagenan Divisi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.</p>	<p>Supervising: Division of Corporate Actuarial Division of Individuals and Group Insurance Division of Employee Benefits.</p> <p>Director of Finance Supervising: Division of Accounting Division of Finance and Investment (incl. subsidiaries) Division of Commercial & Procurement Division of Information Technology Work Unit of Community Partnership and Community Development (PKBL) of Jiwasraya</p> <p>Director of Marketing Supervising: Division of Marketing Division of Sales Division of Agency Division of Pension Funds of Financial Institution.</p>
---	---

2013 Directors Training Table

NAME	POSITION	TRAINING FOLLOWED	TIME	PLACE
Hendrisman Rahim	President Director	26th Pacific Insurance Conference: Winning Strategies For The Next Generation	October 27 – 30, 2013	Hongkong
Hary Prasetyo	Finance Director	Seminar Trip 2013 PT Trimegah Asset Management	May 25 – 30, 2013	Monaco - Praha
Hary Prasetyo	Finance	Financial Literacy	Dec 2 – 3, 2013	Nusa Dua -

	Director	International Seminar		Bali
De Yong Adrian	Operational Director	Euro Zone Crisis and The Future of Central and Eastern Europe	Apr 28 - May 4, 2013	Austria - Hungaria
De Yong Adrian	Operational Director	<i>26th Pacific Insurance Conference: Winning Strategies For The Next Generation</i>	Oct 27 – 30, 2013	Hongkong

<p>Rapat Direksi Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau Pemegang Saham.</p>	<p>Directors Meeting Directors hold meetings whenever necessary by one or more members of the Board of Directors or through written request of one or more members of the Board or shareholders.</p>
--	---

Directors meeting attendance frequency table

Name	Position	Number of Meetings	Total attendance	(%) Attendance
Hendrisman Rahim	President Director	47	46	98%
Hary Prasetyo	Finance Director	47	44	94%
De Yong Adrian	Marketing Director	47	44	94%
	<i>Average</i>	=	44.6	

<p>Susunan Anggota Direksi : Hendrisman Rahim, sebagai Direktur Utama, merangkap Direktur Pertanggungjawaban; Hary Prasetyo, sebagai Direktur Keuangan;</p>	<p>Board of Directors Composition : Hendrisman Rahim, as the President Director, concurrently the Director of Insurance; Hary Prasetyo, as the Director of Finance</p>
--	---

<p>dan De Yong Adrian, sebagai Direktur Pemasaran.</p> <p>Masa Jabatan Dewan Direksi Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 28 ayat 4, Masa Jabatan Direksi adalah selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali Masa Jabatan tanpa mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p>	<p>Director; and De Yong Adrian, as the Director of Marketing.</p> <p>Tenure of the Board of Directors Under the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 about the State-owned Enterprises Article 28, Paragraph 4, Tenure of Directors is 5 years and can be reappointed for another period without reducing the AGM rights to terminate at any time.</p>
---	--

BOD Terms of Office Table

NAME	POSITION	START	ENDED
Hendrisman Rahim	President Director	Jan 15, 2013	2018
Hary Prasetyo	Director of Finance	Jan 15, 2013	2018
De Yong Adrian	Director of Marketing	Jan 15, 2013	2018

<p>Board of Charter Direksi Direksi berperan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya yang menjadi tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi adalah setara dimana tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi atau <i>primus inter pares</i>. Komposisi Direksi dapat mengakomodasi pengambilan keputusan secara efektif, cepat, dan tepat serta bertindak secara independen. Direksi memiliki integritas dan pengalaman serta kecakapan dalam menjalankan tugas dan memahami kompleksitas usaha. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS</p>	<p>Charter of Board of Directors Directors play a significant role in decision-making in accordance with the allocated tasks and authorities but collective responsibility is applied. The position of each member of the Board of Directors is equivalent where the President Director plays the role to coordinate the activities of Board of Directors or it is called "<i>primus inter pares</i>". Composition of the Board of Directors can accommodate the effective, fast, and accurate decision-making, and also act independently. Directors have the integrity and experience as well as proficiency in performing their duties and also understand the complexity of the businesses. The Board of Directors is accountable to the AGM in accordance with regulations and</p>
--	--

<p>sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.</p> <p>KOMITE DI BAWAH DEWAN DIREKSI</p> <p>Komite Investasi Dasar Pembentukan Komite Investasi Dasar pembentukan Komite Investasi adalah Keputusan Direksi Nomor: 087.SK.U.0413 tanggal 29 April 2013 tentang Pembentukan Komite Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)</p> <p>Tujuan Pembentukan Untuk lebih mengoptimalkan hasil investasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Investasi yang sehat dan hati-hati serta melibatkan lintas sektoral dalam menetapkan kebijakan Investasi.</p> <p>Keanggotaan Komite Investasi Direktur Utama : Ketua merangkap anggota Direktur Keuangan : Wakil Ketua merangkap anggota Kepala Bagian Pengembangan Dana Divisi Investasi : Sekretaris merangkap anggota Direktur Pertanggungjawaban : Anggota Direktur Pemasaran : Anggota Kepala Divisi Investasi : Anggota Kepala Divisi Keuangan, Akuntansi & Inkaso : Anggota Kepala Divisi Aktuaria Perusahaan : Anggota Kepala Divisi Pemasaran : Anggota Aktuaris Perusahaan : Anggota</p> <p>Independensi Anggota Komite Investasi Untuk menjaga independensi Komite investasi dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaksanaannya maka 2 (dua) orang Anggota Komite investasi bukan berasal dari pegawai perusahaan. Komite investasi bertanggung jawab langsung kepada Direksi.</p> <p>Tugas dan Kewajiban Komite Investasi 1. Memantau pelaksanaan dan kegiatan</p>	<p>legislation.</p> <p>THE COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS</p> <p>The Investment Committee Basis to Establish the Investment Committee The Investment Committee is established based on the Stipulation of the Directors No. 087.SK.U.0413 dated 29 April 2013 about the Establishment of Investment Committee of PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).</p> <p>Objectives of Establishment To optimize investment returns while maintaining prudent and healthy investment principles involving the cross-sectoral in setting up investment policies.</p> <p>Members of the Investment Committee President Director : Chairman and member Director of Finance : Vice Chairman and member Section Head of Funds Development of Investment Division: The Secretary and member Director of Insurance : Member Director of Marketing : Member Division Head of Investment : Member Division Head of Finance, Accounting & Inkaso : Member Division Head of Company Actuary : Member Division Head of Marketing : Member Company Actuary : Member</p> <p>Investment Committee Members Independency To maintain the independency of the Investment Committee in carrying out the duties, 2 (two) members of the investment committee are not employees of the Company. Investment Committee is responsible directly to the Board of Directors.</p> <p>Duties and Obligations of Investment Committee 1. Monitoring the implementation and</p>
---	--

<p>investasi berdasarkan batasan-batasan transaksi secara umum dengan tetap mengacu pada pedoman Investasi yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Investasi oleh Tim Pengelola Investasi (Divisi Investasi) berdasarkan acuan/pedoman yang telah ditetapkan secara tertulis. 3. Mengadakan pertemuan setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan kegiatan investasi yang telah berjalan berdasarkan laporan hasil dan posisi investasi yang dibuat oleh Divisi Investasi serta program-program yang akan dilaksanakan selanjutnya. 4. Melakukan review atas hasil investasi setiap bulan. <p>Pelaksanaan tugas Komite Investasi tahun 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menitikberatkan komposisi investasi di Reksadana yang berbentuk eksklusif baik reksadana konvensional maupun reksadana penyertaan terbatas untuk dapat memaksimalkan hasil investasi. • Melaksanakan kerja sama investasi secara lebih selektif dengan Fund Manager yang telah dipilih dalam rapat Komite Investasi sehingga bisa memberikan tingkat return yang maksimal untuk dapat mem-back up produk asuransi yang berbasis investasi yang memberikan bunga tinggi. • Melaksanakan transaksi saham secara lebih selektif dan merealisasikan sebagian keuntungan dari saham sesuai target yang ingin dicapai. • Menambah komposisi obligasi korporasi dengan memperhatikan tingkat yield yang diberikan masih diatas tingkat bunga deposito. • Melakukan evaluasi setiap triwulan atas penempatan-penempatan investasi yang bersifat eksklusif pada Fund Manager dengan tujuan untuk monitoring atas return maupun portofolio. • Mengelola langsung produk new Js Link dan melakukan monitoring atas NAB dan kebijakan atas portofolio setiap bulan <p>Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan</p>	<p>investment activities based on transaction boundaries in general with reference to the investment guidelines that have been set.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Monitoring the implementation of Investment conducted by the Investment Management Team (Investment Division) based on the written references / guidelines that have been set. 3. Organizing monthly meeting to evaluate the implementation of investment activities that have been conducted based on the report of investment position and results submitted by the Division of Investment, as well as monitoring the programs that will be implemented later on. 4. Organizing monthly reviews on the result of investment. <p>Implementation of Duties of the Investment Committee in 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emphasizing composition of the exclusive mutual funds investment in both conventional and limited mutual funds investment in order to maximize investment returns. • Carrying out more selective investment cooperation with Fund Managers who have been appointed in the meeting of the Investment Committee, thus maximum returns can be generated in order to back up the investment-based insurance products which provide high interest. • Carrying out more selective stock transactions and actualize some returns from the stocks according to the expected target. • Increasing the composition of corporate bonds by considering the yield above the interest rate of time deposit. • Evaluating quarterly the placement of exclusive investment by the Fund Managers with the purpose to monitor the returns and portfolio. • Directly managing new JS Link products and monitoring NAB and portfolio policies each month. <p>Assessment of the Board of</p>
---	--

Direksi

Kinerja Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham.

Kinerja Direksi serta pelaksanaan kewajiban utama mereka dievaluasi oleh Dewan Komisaris dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap bagian. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema komposisi dan pemberian insentif bagi Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direksi merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Direksi. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas kerja Direksi.

ASSESSMEN GCG

Kualitas penerapan GCG di Perusahaan diuji berdasarkan pedoman yang dimiliki Perusahaan dan efektivitas pelaksanaan pedoman tersebut dapat menciptakan nilai bagi pemegang saham serta tidak merugikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Penilaian GCG dalam Perusahaan diperlukan untuk membantu investor dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata kelola di Perusahaan.

Dalam penilaian GCG Perusahaan mengkorelasikan antara angka peringkat tata kelola dengan rasio keuangan, valuasi (Price to Book Value atau PBV) dan kinerja harga saham. Hubungan tersebut diperoleh dengan menganalisa jenis produk ke dalam kuartil dari pemeringkatan tata kelola Perusahaan di berbagai sektor. Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan, peningkatan nilai perusahaan dan pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pemangku kepentingannya, maka seluruh manajemen dan karyawan menyadari bahwa nilai-nilai yang telah

Commissionaires and the Board of Directors

Performance of the Board of Commissionaires is evaluated by the shareholders in the AGM. In overall, performance of the Board of Commissionaires is defined by their duties and responsibilities stated in the applicable legislation and the Company Statute as well as the mandate of the shareholders.

Performance as well as the implementation of primary responsibilities of the Board of Directors is evaluated by the Board of Commissionaires in a joint meeting of the Board of Directors and Board of Commissionaires. The result of performance evaluation of the Board of Directors is an indispensable part of the composition and incentives scheme for the Board of Directors. The result of performance evaluation becomes one of the basic considerations for shareholders to terminate and / or re-appoint the Directors. It also becomes an assessment as well as improvement tools to increase the effectiveness of the Board of Directors' operations.

GCG Assessment

Quality of GCG implementation is evaluated according to the guidelines of the Company. The effectiveness of the implementation of guidelines can create values for shareholders and does not harm the interests of other stakeholders. Assessment of GCG implementation in the Company is needed to assist investors in obtaining a clear picture of governance practices in the Company.

The evaluation of Company's GCG correlates the governance rank, financial ratios, valuation (Price to Book Value or PBV) and stock price performance. The correlation is generated by analyzing the types of products into the quartile of corporate governance ranking in various sectors. In order to achieve the objectives of the Company, the increase of values of the Company and the fulfillment of obligations of the Company to its stakeholders, the entire management and employees realize that the values that were rooted by the predecessors and the principles of Good

<p>ditanamkan oleh para pendahulu dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) harus secara utuh dan berkesinambungan diterapkan dalam pelaksanaan perusahaan.</p> <p>Hal ini dibuktikan dengan tetap berdirinya Jiwasraya sejak 154 tahun yang lalu, telah berperan dalam memberikan perlindungan jiwa dan keuangan bagi para nasabahnya. Jiwasraya telah mampu bertahan dan terus berubah untuk menjadi lebih baik di tengah-tengah persaingan industri asuransi melewati 3 (tiga) kali tahun keemasan.</p> <p>Semua yang telah dilalui ini tidak terlepas dari komitmen Perusahaan yang telah menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional, sebagaimana telah diamanatkan oleh kementerian BUMN dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN.</p> <p>Perusahaan pada tahun 2013 telah dilakukan penilaian (assessment) penerapan GCG oleh pihak assessor independent untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan implementasi prinsip-prinsip GCG telah dijalankan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metodologi assessment yang mengacu pada Kerangka Acuan Pelaksanaan Assessment dan Penerapan Good Corporate Governance di BUMN dengan parameter baru sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S/MBU/2012.</p> <p>Manifestasi Good Corporate Governance Jiwasraya</p> <p>Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Jiwasraya diwujudkan dengan 10 poin implementasi tata kelola perusahaan. 10 poin tersebut diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar deviden tahunan kepada Pemegang Saham. 2. Memberikan bonus kepada karyawan. 3. Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk setiap kali pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 4. Rapat antar Komisaris dan Direksi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali, 	<p>Corporate Governance (GCG) must be fully and continuously implemented in the operations of the Company.</p> <p>The establishment of Jiwasraya since 154 years ago has proven its role in providing life and financial protection for its customers. Jiwasraya is able to survive and continue to change and getting better in the middle of the insurance industry competitiveness going through 3 (three) golden years.</p> <p>All that has been through is part of the Company's commitment in implementing GCG consistently and setting the GCG principles as the basis for operations, as it has been mandated by the Ministry of SOEs stated in the Decree of the Minister of State-owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 about the GCG Implementation in SOEs.</p> <p>In 2013, the Company appointed an independent party to carry out a GCG assessment to determine the extent of its implementation and compliance to corporate governance principles. Assessment was conducted by using the assessment methodology according to the Term of Reference for Good Corporate Governance Implementation and Assessment in SOEs using new parameters based on the Stipulation of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: SK-16/S/MBU/2012.</p> <p>Manifestation of Good Corporate Governance in Jiwasraya</p> <p>Application of governance principles in Jiwasraya is embodied by 10 points of corporate governance implementation. The 10 points are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paying dividend to shareholders annually. 2. Giving bonuses to employees. 3. Establishing a Goods and Services Procurement Team for each procurement of goods / services. 4. Organizing a meeting between the Board of Commissionaires and the Board of Directors
---	--

atau lebih yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

5. Memberlakukan ketentuan underwriting dalam setiap proses pengakseptasian risiko.
6. Memenuhi ketentuan minimal tingkat kesehatan perusahaan (RBC)
7. Melakukan pengalihan risiko kepada perusahaan Reasuransi.
8. Memiliki Standard Operating Procedure yang jelas untuk semua unit kerja.
9. Menyampaikan segala informasi perusahaan terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat di akses melalui web site.
10. Adanya program pengalihan Penagih menjadi Unit Manager yang telah dilaksanakan pada Tahun 2012.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM DAN PENGENDALI UTAMA

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan sebesar 100% dan dikendalikan sepenuhnya oleh Kementerian BUMN RI

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dipilih melalui fit and proper tes yang ketat sehingga memiliki profesionalitas dan loyalitas yang tinggi agar tidak memiliki afiliasi dengan entitas asosiasi atau anak perusahaan Jiwasraya.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaan GCG, keberadaan Sekretaris Perusahaan diperlukan untuk memegang peranan penting dalam hal Interaksi Perusahaan dengan para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Fungsi-fungsi Sekretaris Perusahaan tersebut, di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dijalankan oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Sumarsono, selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan dibantu oleh dua

at least once a month, or more, according to the needs of the Company.

5. Enforcing the provisions for underwriting in each process of accepting the risks.
6. Fulfilling the minimum requirement for health level of the Company (RBC)
7. Transferring the risks to reinsurance companies.
8. Having clear Standard Operating Procedures to all work units.
9. Delivering all information about the Company's governance accessible through the web site.
10. Maintaining a program to shift the Collectors into Unit Managers since its implementation in 2012.

INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS AND MAJORITY INTERESTS

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) is a State-owned Enterprise (SOE) with 100% ownership and it is fully controlled by the Ministry of State-owned Enterprises of the Republic of Indonesia.

AFFILIATION BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONAIRES AND DIRECTORS WITH SUBSIDIARIES

The Board of Commissionaires and the Board of Directors of the Company are elected through a tight fit and proper test to ensure high professionalism and loyalty avoiding affiliation with associated entities or subsidiaries of Jiwasraya.

CORPORATE SECRETARY

In implementating Good Corporate Governance (GCG), the existence of the Corporate Secretary is significant to manage interactions of the Company with the shareholders and stakeholders. Functions of the Corporate Secretary, in PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) is carried out by the Division Head of Company Secretariat. Position of the Corporate Secretary is currently held by Sumarsono, as the Division Head of Corporate Secretariat. In performing its functions, the Corporate Secretary is

<p>Bagian yaitu : Bagian Administrasi Sekretariat Perusahaan dan Bagian Humas.</p> <p>Profil Sekretaris Perusahaan Sumarsono</p> <p>Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur tahun 1958 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Beliau menjabat Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2008 setelah menjabat Direktur PT Stania Bhinekajasa (1993) dan Direktur PT Eka Daya Karya Sejahtera. Karimya banyak didedikasikan kepada Perseroan dengan jabatan Kepala Seksi Kantor Regional Malang (1986), Kepala Bagian Umum dan SDM Kantor Regional Makassar (1996), Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern dan Kepala Bagian Hukum di Kantor Pusat.</p> <p>Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan tahun 2013</p> <p>Pelaksanaan fungsi-fungsi Sekretaris Perusahaan berhubungan dengan berbagai macam prosedur internal Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan. Dalam hal ini Sekretaris Perusahaan dituntut untuk mampu mengakomodasi seluruh aktivitas bisnis yang terkait dengan Perusahaan secara efektif sehingga mendukung kinerja Perusahaan. Tugas utama dari seorang Sekretaris Perusahaan adalah mengingatkan Direksi tentang tanggung jawab dan akuntabilitas mereka dalam menerapkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>AUDITOR INTERNAL</p> <p>Ruang lingkup Audit Satuan Pengawasan Intern mencakup pemeriksaan, pengkajian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian internal perusahaan, dan mutu kerja dari pelaksanaan tanggung jawab yang ditetapkan.</p> <p>Profil Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern</p>	<p>supported by two sections, namely: the Company Secretariate Administration and the Public Relations.</p> <p>Profile of the Corporate Secretary Sumarsono</p> <p>Born in Tuban, East Java, in 1958, he graduated from the Faculty of Law, Unibraw. He has served as Corporate Secretary since 2008 after being appointed as the Director of PT Stania Bhinekajasa (1993) and Director of PT Eka Daya Karya Sejahtera. He dedicated much of his career to the Company through a number of positions including the Section Head of Malang Regional Office (1986), the Head of General Affairs and Human Resources at Makassar Regional Office (1996), the Head of Internal Control Unit and the Head of the Legal Department at the Head Office.</p> <p>Implementation of Tasks of the Corporate Secretary in 2013</p> <p>The function of Corporate Secretary is associated with a number of internal procedures of the Company as well as the applied legislations to the Company. In this case, the Corporate Secretary is required to accommodate all business activities of the Company effectively in order to support its performance. The main task of Corporate Secretary is to remind the Board of Directors about their responsibilities and accountability in applying and implementing good corporate governance in accordance with the applicable regulations.</p> <p>INTERNAL AUDITOR</p> <p>The scope of audit of the Internal Control Unit includes the examination, assessment and evaluation on the adequacy and effectiveness of internal control system, and also the work quality to perform the assigned responsibilities.</p> <p>Profile of the Division Head of Internal Audit</p>
---	--

Erry Syarifudin, SE, AAAIJ, PIA

Pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara tahun 1963 ini merupakan Sarjana Perpajakan dari Sekolah Tinggi Keuangan Nlaga dan Negara (1996). Beliau memulai karirnya sejak 1985 hingga dipercaya sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 1 September 2012 hingga saat ini.

Program Kerja Pengawasan Tahunan tahun 2013

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013 disusun berdasarkan sasaran, strategi dan kebijakan perusahaan yang pokok-pokoknya ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran

1. Pencapaian Skor dalam penilaian Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance (GCG)) minimal 85 (delapan puluh lima);
2. Mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran maupun penyalahgunaan wewenang/ penyalahgunaan uang perusahaan terhadap unit kerja yang ada di Head Office (HO), Regional Office (RO) dan Branch Office (BO);
3. Penggunaan biaya yang efektif, efisien dan seimbang agar dapat tercapai sasaran pendapatan perusahaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2013 terhadap 17 Regional Office, 71 Branch Office dan 14 Divisi yang ada di HO; serta menyelesaikan 59 temuan tahun 2012 yang termuat dalam Surat Pemberitahuan Masalah (SPM) yang belum ditindaklanjuti tuntas

Erry Syarifudin, SE, AAAIJ, PIA

Born in Siantar, North Sumatra, in 1963, he graduated from the Tax Study Program of the College of Commercial and State Finance (1996). He started his career in 1985 and was appointed as the Division Head of Internal Audit on 1 September 2012 up to present.

Annual Monitoring Work Program for the Year of 2013

Annual Monitoring Work Program (PKPT) in 2013 was compiled by objectives, strategies and policies of the Company as the following:

Objectives

1. Achieving at least 85 (eighty-five) score value for GCG assessment;
2. Preventing irregularities, leakages or abuses of authorities / misuses of funds of the Company in the existing units in the Head Office (HO), Regional Office (RO) and Branch Office (BO);
3. Using effective, efficient and balanced costs in order to achieve the target of income of the Company as set in the Work Plan and Budget (CBP) in 2013 into 17 Regional Offices, 71 Branch Offices, and 14 Divisions in HO; and also accomplishing 59 findings from the year of 2012 as stated in the Notification Letter (SPM). Follow up actions to completely solve all cases must be initiated in order to result zero (0) finding;

<p>untuk ditindaklanjuti tuntas sehingga menjadi 0 temuan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memiliki Auditor yang profesional, independen dan memiliki kompetensi yang handal; 5. Memosisikan peran SPI yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan melakukan penambahan jumlah pemeriksa wilayah, yang semula 3 wilayah menjadi 6 wilayah dengan cakupan wilayah pemeriksaan secara nasional yang tersentralisasi di Head Office; 6. Menuntaskan tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan Auditor ekstern (BPK, KAP) yaitu temuan BPK tahun buku 2004 & 2005; tahun buku 2007 dan tahun buku semester I tahun 2010 sejumlah 16 temuan yang belum ditindaklanjuti tuntas, akan ditindaklanjuti tuntas sehingga menjadi 0 (nol) temuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Having professional, independent and reliable and competence Auditors; 5. Establishing the independent role of Internal Control Unit (SPI) that reports directly to the President Director, by adding the number of regional inspectors, from originally 3 regions upto 6 regions with its national coverage of inspection is centralized at the Head Office; 6. Finalizing the follow up actions on the findings of eksternal Auditors (BPK, KAP), which are findings from the report for the period of 2004 & 2005, 2007 and first semester 2010. All 16 findings must be cleared up in order to result zero (0) finding
<p>Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan pengarahannya penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) secara intensif; 2. Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko / risk base audit berdasarkan Risk profile yang di keluarkan oleh Konsultan Risk Management. 3. Melakukan pembinaan, konsultasi kepada Auditor serta mensosialisasikan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan perusahaan yang berlaku; 4. Meningkatkan kompetensi, kualitas 	<p>Strategy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring and directing the implementation of Good Corporate Governance (GCG) intensively; 2. Implementing the Risk-Based Audit base on the Risk Profile issued by the Risk Management Consultant. 3. Providing guidance and consultation to the Auditors as well as promoting the applicable provisions and regulations in the Company; 4. Improving competencies, quality and knowledge of personnel of the Internal

<p>dan wawasan pengetahuan aparat Satuan Pengawasan Intern yang tersentralisasi di Head Office;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menyatukan persepsi para Pemeriksa dengan melakukan pembinaan secara terus menerus; 6. Menginventarisasi temuan yang belum ditindak lanjuti secara tuntas oleh auditi serta memantau secara berkelanjutan tindaklanjut temuan yang telah dilakukan oleh unit kerja terkait. 	<p>Control Unit that is centralized in the Head Office;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Unifying perceptions of the Examiners with continuous development; 6. Carrying out inventory of the findings that have not been addressed by the auditee and monitoring thoroughly the ongoing follow up initiated by the related units on the findings.
<p>Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 152/PMK.010/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian; 2. Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko yang dikeluarkan oleh Tim ASGARAJASKEU tanggal 12 April 2011 serta Risk profile yang dikeluarkan oleh Konsultan Risk Management <ol style="list-style-type: none"> a. Nota Dinas Direksi No.355a.NDU.12.2004 tanggal 6 Desember 2004 Perihal: Hal-hal pokok yang harus dilaksanakan dan diketahui oleh seorang Branch Manager b. Surat Keputusan Direksi No.003a.SKU.0111 tanggal 6 -1-2011 tentang Pencegahan dan Penyelesaian Penyalahgunaan Uang perusahaan dilingkungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) c. Nota Dinas Direksi Nomor : 009.NDU.0111 tanggal 13 Januari 2011 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan pencegahan dan 	<p>Policies</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.152/PMK.010/2012 dated October 3, 2012, about Good Corporate Governance For Insurance Company; 2. Guidelines for Risk-Based Internal Audit issued by ASGARAJASKEU team dated April 12, 2011, and the Risk Profile issued by the Risk Management Consultant <ol style="list-style-type: none"> a. Official Memorandum of the Board of Directors No.355a.NDU.12.2004dated December 6, 2004, Subject: Fundamental Issues to be implemented and understood by the Branch Managers b. The Stipulation Letter of the Board of Directors No.003a.SKU.0111 dated June 1, 2011 about the Prevention and Settlement of Manipulation of Company Funds in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) c. Official Memorandum of the Board of Directors No.: 009.NDU.0111 dated January 13, 2011 Subject: Guidelines for the Implementation of the Prevention and

<p>penyelesaian uang perusahaan (PUP)</p> <p>d. Nota Dinas Direksi Nomor: 232.NDU.08.2005 Perihal : Penertiban Administrasi dan Operasional di Regional Office , Branch Office dan Area Office</p> <p>e. Nota Dinas Direksi Nomor 180.NDU.06.2007 tanggal 18 - 6- 2007 Perihal : Pengendalian biaya Perusahaan.</p> <p>f. Nota Dinas Direksi Nomor: 319.NDU.1108 tanggal 8-11-2008 perihal : Pengeluaran Biaya Representasi</p> <p>g. Nota Dinas Direksi Nomor : 220.NDK.0501 tanggal 9 - 5- 2008 Perihal: Addendum Nota Dinas No.05a.NDK.0101</p> <p>h. Nota Dinas Direksi Nomor: 05a.NDK.012001 tanggal 9 Januari 2001 Perihal: Tertib Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional</p> <p>i. Nota Dinas Direksi No.446.NDU.102001 tanggal 9 Oktober 2001 Perihal : Pedoman Pembuatan Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.</p> <p>j. Nota Dinas Direksi tentang job spesifikasi dan kompetensi untuk aparat Satuan Pengawasan Intern serta Perubahan Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).</p> <p>3. Pedoman e-audit yang ditetapkan BPK-RI dalam bentuk nota kesepahaman dan Peraturan bersama yaitu :</p> <p>a. Nota kesepahaman antara Sekretariat Jendral BPK – RI dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor : 274/NK/XXIII.2/5/2011 dan Nomor 047.SJ-U.0511 tanggal 26 Mei 2011</p>	<p>and Settlement of Company Funds (PUP)</p> <p>d. Official Memorandum of the Board of Directors No.: 232.NDU.08.2005 Subject: The Control of Administration and Operations at the Regional Offices, Branch Offices and Area Offices.</p> <p>e. Official Memorandum of the Board of Directors No. 180.NDU.06.2007 dated June 18, 2007 Subject: Controlling the Company Expenditures.</p> <p>f. Official Memorandum of the Board of Directors No.: 319.NDU.1108 dated Aug 11, 2008 Subject: Representation Expenses</p> <p>g. Official Memorandum of the Board of Directors No.: 220.NDK.0501 Sep 5, 2008, Subject: Addendum to the Official Memorandum No.05a.NDK.0101</p> <p>h. Official Memorandum of the Board of Directors No.: 05a.NDK.012001 dated January 9, 2001 Subject: Orderly Management of the Operational Costs Budget</p> <p>i. Official Memorandum of the Board of Directors No.446.NDU.102001 dated October 9, 2001 Subject: Guidelines for Reporting and Follow Up Actions on the Results of Examination.</p> <p>j. Official Memorandum of the Board of Directors on the job specification and competencies of the personnel of Internal Control Unit and the Organizational Structure Change of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).</p> <p>3. E-audit guidelines set by BPK-RI written in a memorandum of understanding and joint-regulation are:</p> <p>a. The Memorandum of Understanding between the Secretariate General of BPK - RI with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Number: 274/NK/XXIII.2/5/2011 and No. 047.SJ-U.0511 dated May 26, 2011 about</p>
---	---

<p>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dalam rangka pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <p>b. Peraturan Bersama Sekretariat Jendral BPK – RI dengan Direksi PT Asuransi Jiwasraya tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data (e-audit) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam rangka pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.</p> <p>Dengan ditetapkannya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2013 diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan aktivitas pengawasan secara terpadu baik oleh pimpinan/atasan langsung maupun oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), sehingga pelaksanaan tertib administrasi dan tertib operasional dapat berjalan dengan baik serta terhindar dari terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan wewenang/ penyalahgunaan uang perusahaan (PUP) dalam rangka menunjang keberhasilan usaha perusahaan.</p> <p>Independensi Audit Internal Satuan pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama, disamping menyampaikan laporan kepada Direktur Utama, juga memberikan laporannya kepada Komisaris dan Komite Audit. Segala sesuatu terkait dengan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengawasan secara internal yang dilakukan oleh satuan Pengawas Intern, didasarkan pada Internal Audit Charter.</p> <p>Pelaksanaan Tugas Audit Internal tahun 2013 Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern sepanjang Semester I tahun 2013 adalah:</p> <p>1. Desk Audit</p>	<p>the Information System Development and Management for the examination of the State Financial Management and Responsibility</p> <p>b. The joint-regulation of the Secretariate General of BPK-RI and the Preident Director of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) on the technical guidelines for information system development and management to access the data (e-audit) at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) for the examination of the State Financial Management and Responsibility.</p> <p>With the enactment of the 2013 Annual Monitoring Work Program (PKPT), it was expected that monitoring activities could be improved in an integrated manner both by direct leaders / supervisors or by the Internal Control Unit (SPI), thus, administration and operations could be conducted properly in order to avoid leakages and misuse of authorities / Company's funds (PUP) toward the successful business of the Company.</p> <p>Independency of Internal Audit Internal Control Unit is responsible to the President Director, while at the same time also report to the Board of the Commissionaires and the Audit Committee. Internal Audit Charter becomes the basis to carry out duties and responsibilities of the Internal Control Unit.</p> <p>Implementation of Tasks of the Internal Audit in 2013 The activities that were carried out by the Internal Control Unit during the first semester of 2013 were:</p> <p>1. Desk Audit</p>
---	--

<p>a. Pemeriksaan keuangan secara Desk Audit terhadap 17 Regional Office sesuai dengan data laporan keuangan yang masuk ke Divisi Satuan Pengawasan Intern sampai dengan laporan keuangan bulan Desember 2013, serta mengaktifkan pelaporan hasil desk-audit berupa Surat Pemberitahuan Masalah (SPM) oleh Pemeriksa Regional Office ke Head Office (Divisi Satuan Pengawasan Intern).</p> <p>b. Rekonsiliasi data penyalahgunaan uang perusahaan (PUP) yang dirinci per pelaku di Regional/Branch Office telah dilakukan untuk data PUP per-31 Desember 2013.</p> <p>2. On-the-Spot Audit</p> <p>Sampai dengan 31 Desember 2013 telah dilakukan 16 (enam belas) pemeriksaan General Audit (GA) di Regional Office/Branch Office dan HO.</p> <p>3. Evaluasi Nilai X Bobot</p> <p>Melakukan Evaluasi Hasil Kegiatan Usaha (evaluasi Nilai X Bobot) Regional Office dan Branch Office untuk periode Januari sampai dengan Desember 2013</p> <p>4. Pemeriksaan Khusus</p> <p>Sampai dengan Desember 2013 telah dilakukan pemeriksaan khusus sebanyak 5 pemeriksaan ke Semarang RO dan Malang RO sebanyak dua kali, Jakarta III RO dan Makassar RO` (Masohi AO & Ambon BO)</p> <p>5. Tugas-Tugas Pengawasan Lain</p> <p>Disamping tugas pemeriksaan tersebut diatas, Divisi Satuan Pengawasan Intern juga melakukan tugas-tugas pengawasan tambahan lainnya antara lain yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi data kondite aparat perusahaan sampai dengan Desember 2013 baik dinas luar 	<p>a. Desk audit was carried out in financial inspection on 17 Regional Offices based on the data from the financial statements for the end period of December 2013, which were submitted to the Division of Internal Control. The results of desk audit were the Notification Letters (SPM) released by the Regional Audit Office sent to the Head Office (Division of Internal Control).</p> <p>b. Reconciliation of PUP data as of December 31, 2013, about the manipulation of Company funds (PUP) specified by perpetrators had been done in the Regional / Branch Office.</p> <p>2. On-the-Spot Audit</p> <p>Up to December 31, 2013, 16 (sixteen) General Audit (GA) had been carried out in the Regional Office / Branch Office and HO.</p> <p>3. Value X Weight Evaluation</p> <p>Evaluating Business Activities (Value X Weight evaluation) of the Regional Office and Branch Office for the period of January up to December 2013</p> <p>4. Special examination</p> <p>As of December 2013, there were 5 special examination, which were two times on the ROs in Semarang and Malang, and also on the Ros in Jakarta III and Makassar (including AO in Masohi & BO in Ambon)</p> <p>5. Other Monitoring Tasks</p> <p>In addition to the previously mentioned examination duties, the Division of Internal Control also carries out additional tasks which are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Providing the behavior (conduite) data of the inbound and outbond officers up to December 2013, especially
--	--

maupun aparat dinas dalam terutama mengenai keterlibatan aparat dalam masalah keuangan serta penyimpangan-penyimpangan lainnya.

- Meneliti, memeriksa serta mempersiapkan surat-surat tanggapan atas laporan Direksi kepada BPK RI, dan KAP.
- Memantau dan mempersiapkan surat menyurat mengenai penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Divisi-Divisi di Head Office dan Regional/ Branch Office sampai dengan Semester 2 Tahun 2013.
- Memantau dan mempersiapkan Laporan tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2007 dan tahun sebelumnya (2004-2005), serta temuan BPK-RI Tahun 2009 s/d Semester I tahun 2010.

AUDITOR EKSTERNAL

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan oleh Audit Eksternal atau Kantor Akuntan Publik. Auditor Eksternal Perusahaan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Auditor Eksternal yang ditunjuk harus memiliki integritas dan reputasi yang baik, khusus untuk Perusahaan Asuransi yang sahamnya tercatat di bursa, harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bapepam.
- b. Penunjukan KAP dilakukan oleh RUPS berdasarkan proses yang transparan atas rekomendasi Komisaris atau Komite Audit setelah melalui seleksi berdasarkan kriteria dan ketentuan Perusahaan.
- c. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan.

regarding the involvement of officers in financial problems and other irregularities.

- Researching, inspecting and preparing feedback letters regarding the report of the Board of Directors to BPK RI and KAP.
- Monitoring and preparing correspondence regarding the follow-up actions on findings from the examination on the Divisions in the Head Office and Regional / Branch Offices up to 2nd semester in 2013.
- Monitoring and preparing the Report of follow-up actions on the results of BPK-RI in 2007 and previous years (2004-2005), as well as the findings of BPK-RI from 2009 up to the 1st Semester 2010.

EXTERNAL AUDITOR

Independent supervisory function on financial aspect of the Company is conducted by the External Auditor or Public Accounting Firm. External Auditor of the Company should meet the following principles:

- a. The appointed external auditors must have integrity and good reputation. Especially for insurance companies listed in the stock exchange, they can only appoint registered Public Accounting Firms (KAP) at Bapepam.
- b. Assignment of KAP is carried out by the AGM based on a transparent process of the recommendation of the Board of Commissioners or the Audit Committee through a selection mechanism based on the Company's terms and criteria.
- c. External Auditors shall be free from the influence of the Board of Commissioners, Board of Directors and other interested parties in the Company.

<p>d. Auditor Eksternal harus memiliki akses atas semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan Asuransi dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.</p> <p>e. Auditor Eksternal tidak diperbolehkan memberikan jasa lain selain jasa audit. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal adalah: Audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Audit atas laporan kinerja perusahaan Audit atas kepatuhan dan ketaatan pada peraturan perundangan dan pengendalian yang berlaku Audit atas laporan pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) <p>Berdasarkan Berdasarkan Risalah RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2012 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 29 April 2013, Jiwasraya telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Sidik dan Rekan dengan lisensi KMK No. 758/KM.1/2007 untuk melakukan audit di Perusahaan. Cakupan audit meliputi jasa financial audit dan Laporan Keuangan, selain itu juga melakukan beberapa jasa audit kepatuhan dan audit evaluasi kinerja.</p> <p>Biaya Audit yang dikeluarkan untuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik dan Rekan adalah sebesar Rp. 469.800.000,00</p> <p>Sesuai dengan surat No. 035/HS&R.SW/ST-JIWASRAYA/VII/13 tanggal 2 September 2013 nama tim audit KAP Hertanto, Sidik dan Rekan yang melakukan audit di Perusahaan adalah sebagai berikut :</p> <p>Partner : Suhajar Wiyoto,MM Technical Advisor : Indra Soesetiawan,</p>	<p>d. External Auditora shall have sufficient access to all required accounting records and supporting data in order to enable the Auditors to come up with opinion on fairness, basic obedience, and conformity of the financial statement of Insurance Company based on the Indonesia financial accounting standards.</p> <p>e. External Auditors are not allowed to provide services other than the audit.</p> <p>The activities carried out by the External Auditors are:</p> <p>The audit of financial statement for the fiscal year ended on December 31, 2013, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> The audit on company performance reports The audit on compliance and adherence to the applicable regulations and controls The audit on funds management of the Community Partnership and Community Development Program (PKBL) <p>Based on the minutes of meeting of the AGM about the approval on the Annual Report 2012 of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dated April 29, 2013, Jiwasraya has appointed the Public Accountant (KAP) Hertanto, Sidik and Partners with KMK licenses No.. 758/KM.1/2007 to audit the Company. The scope of audit covers the financial services and financial statement and also compliance audit and performance evaluation audit.</p> <p>Audit costs paid to Hertanto, Sidik and Partners Public Accounting Firm is IDR469,800,000.00</p> <p>Based on the letter No. 035/HS & R.SW/ST-JIWASRAYA/VII/13 dated September 2, 2013, the name of audit team of KAP Hertanto, Sidik and Partners is shown as follow:</p> <p>Partner : Suhajar Wiyoto, MM Technical Advisor : Indra Soesetiawan, Ak.,</p>
---	--

<p style="text-align: right;">Ak.,CPA., CA</p> <p>Manajer : Malik Supervisor : Holili Supriadi Ketua Tim : Juhana Anggota Tim : Ira Dwi Nuryanti Julianto Tomy Ibrahim Eko Prasetiawan Lady Diana Lee Ronald Adrianus</p> <p>Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan hingga periode terakhir dilakukan oleh Auditor Independen dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".</p> <p>Independensi</p> <p>Audit Tim yang ditugasi adalah independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) dan peraturan Pasar Modal sehubungan dengan audit Perusahaan.</p> <p>Tidak terdapat hubungan personal, pemberian jasa profesional lain atau hubungan bisnis antara KAP Hertanto, Sidik dan Rekan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi independensi KAP sebagai auditor Jiwasraya.</p> <p>MANAJEMEN RISIKO</p> <p>Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi memiliki berbagai macam risiko terkait dengan aktivitas usahanya. Manajemen Risiko Perusahaan dilakukan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang, suku bunga dan likuiditas.</p> <p>Perusahaan memiliki kebijakan atas Manajemen Risiko sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/kmk.06/2003, yang mengacu pada penilaian kesehatan perusahaan dan risiko pergerakan mata uang.</p> <p>Fungsi Manajemen Risiko Jiwasraya dijalankan oleh Divisi Investasi dan Divisi Aktuaria dengan pertimbangan Direksi. Fungsi Divisi Investasi dan Divisi Aktuaria adalah</p>	<p style="text-align: right;">CPA., CA</p> <p>Manager : Malik Supervisor : Supriya Holili Team Leader : Juhana Team Members : Ira Dwi Nuryanti Julianto Tomy Abraham Eko Prasetiawan Lady Diana Lee Ronald Adrianus</p> <p>The audit on the financial statement of the Company for the latest accounting period was performed by the Independent Auditor and it came up with the audit opinion "unqualified".</p> <p>Independency</p> <p>An Audit Team, which is appointed to perform auditing, must be independent in accordance with the Public Accountant Audit Standard (SPAP) and the Capital Market regulations about auditing.</p> <p>There are no personal relationships, appointment of other professional services or business relationship between KAP Hertanto, Sidik and Partners with the Company that may affect the independence of the KAP as the auditor of Jiwasraya.</p> <p>RISK MANAGEMENT</p> <p>As an insurance companies, Jiwasraya have a wide range of risks associated with its business activities. Company's Risk Management is carried out to minimize losses on the value of assets and liabilities arising from the fluctuation of currency exchange rates, interest rates and liquidity.</p> <p>The Company has a policy on Risk Management in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003, which refers to the assessment of the Company's health and risk from currency fluctuation.</p> <p>Risk Management function of Jiwasraya is conducted by the Division of Investment and Division of Actuarial by considering advices</p>
---	--

menjaga terjadinya currency mismatch.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan sistem pengendalian internal Jiwasraya merujuk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Pasal 26.

Penerapan pengendalian keuangan dan operasional dilakukan secara berjenjang meliputi seluruh elemen yang terdapat di Perusahaan melalui pengawasan dan penasehatan terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit.

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, integritas yang tinggi, nilai etika serta kompetensi pegawai.

Auditor Internal (SPI) merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Audit Internal di Perusahaan, AI melakukan upaya peningkatan pengendalian internal (internal control) dalam berbagai kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian internal di lingkungan Perusahaan senantiasa dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha perusahaan.

Evaluasi Atas Efektivitas Pengendalian Internal

Perusahaan membuat Laporan Manajemen tahunan secara memadai yang di dalamnya memuat evaluasi atas efektivitas pengendalian internal. Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dirancang oleh, atau di bawah pengawasan

from the Board of Directors. Function of Division of Investment and Division of is to maintain the currency mismatch.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Implementation of Jiwasraya internal control system refers to the Regulation of the Minister of State-owned Enterprises Number: PER-01 / MBU/2011 about the Implementation of Good Corporate Governance, Article 26.

Implementation of financial and operational control is conducted at every organizational level covering all elements in the Company through supervision and counseling on the adequacy and fairness of the process in preparing financial statement. Risk management is carried out by taking into account the precautionary principle and support from the Audit Committee.

The Board of Directors establishes an effective system of internal control to safeguard investments and assets of the Company. The internal control on the Company's environment is implemented with discipline and structured, high integrity, ethical values and competency of the employees.

Internal Auditor (SPI) as part of the Internal Control System is assigned to support the President Director in fulfilling its obligations to the Shareholders and be responsible for implementing Internal Audit in the Company. Internal Audit increases the internal control in various operations in the Company. Internal control on the Company's environment is continuously evaluated to be able to follow the development of the Company's businesses.

Evaluation on the Effectiveness of Internal Control

The Company publishes an adequate Management Report annually in which it includes an evaluation on the effectiveness of internal control. Internal control on financial reporting is a process designed by, or under the supervision of the President Director and

Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan dilakukan oleh personel lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013. Dalam melakukan penilaian, Manajemen Perusahaan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Internal Control – Integrated Framework yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”). Berdasarkan penilaian ini, manajemen menyimpulkan bahwa hingga 31 Desember 2013, pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan telah efektif.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bentuk pertanggungjawaban sosial PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2013 adalah mengalokasikan dana sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan 120 Mitra Binaan yang tersebar di 6 (enam) wilayah, termasuk didalamnya kerja sama Penyaluran Sinergi antar BUMN Pembina sebesar Rp 5.500.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah kami tindak lanjuti dengan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya dan menyusul dengan PT PNM (Persero) Jakarta.

Dana yang telah kami salurkan sampai dengan 30 Desember 2013 sebesar 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) ke 63 (enam puluh tiga) Mitra Binaan dibidang industri, perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Jasa di wilayah Jabodetabek , wilayah Jawa barat, Wilayah Jawa Timur dan Wilayah kalimantan Barat. Program pertanggungjawaban sosial

the Director of Finance and also performed by other personnel in order to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Consolidated Financial Statement for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

Management of the Company assessed the effectiveness of internal control on financial reporting of the Company as of December 31, 2013. In conducting the assessment, the management of the Company used a number of criteria set by the Internal Control - Integrated Framework which was issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”). Based on this assessment, management concluded that as of December 31, 2013, our internal control on financial reporting was effective.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Social accountability of PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) in 2013 was in form of funds allocation amounted to IDR7,000,000,000.00 (seven billion Rupiah) to 120 Beneficiary-Partners across 6 (six) regions. It includes funds allocation of IDR5,500,000.00 (five billion five hundred billion Rupiah) under the cooperation called Synergy Distribution among the SOEs Trustees where we have followed up to PT Plantation Nusantara X (Persero) in Surabaya and PT PNM (Persero) Jakarta.

We had disbursed the funds amounted to IDR2,100,000,000.00 (two billion one hundred billion Rupiah) up to December 30, 2013, to 63 (sixty-three) Beneficiary-Partners operating in industry, trade, Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries and Services in the Greater Jakarta area, West Java, East Java and West Kalimantan Region. Social responsibility programs of Jiwasraya is organized in the Community Partnership and Community

<p>Jiwasraya tersusun dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)</p> <p>Realisasi Penyaluran PKBL sampai dengan bulan Desember tahun 2013 adalah Rp1.577.500.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari penyaluran Program Kemitraan (PK) sebesar Rp1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) 63 Mitra Binaan, dengan perincian sektor sebagai berikut:</p> <p>Industri 12 Mitra Binaan, Modal yang disalurkan Rp 310.000.000,00</p>	<p>Development (PKBL).</p> <p>Actual distribution of funds to PKBL up to December 2013 was IDR1,577,500,000, 00 (one billion five hundred and seventy seven million five hundred thousand Rupiah) which was consisted of funds allocation to Community Partnership Program (PK) was IDR1,485,000,000, 00 (one billion four hundred and eighty-five million Rupiah) to 63 Beneficiary-Partners, with the sector breakdown as the following:</p> <p>Industry 12 Beneficiary-Partners, Funds disbursed Rp 310,000,000,00</p>
---	---

2013 Partnership Fund Distribution Recap Table

Partners Business Sector	Realization Up to 2012		2013 Realization		Realization Up to 2013	
	Number of Unit Partners	Rp	Number of Unit Partners	Rp	Number of Unit Partners	Rp
(1)	(6)=(4)+(2)	(7)=(5)+(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(2)	(7)=(5)+(3)
National						
Industrial Business Structure <i>Struktur Usaha Industri</i>	277	3,609,000, 000	12	310,000,0 00	289	3,919,000,0 00
Trade Business Sector <i>Sektor Usaha</i>	699	9,602,700, 000	42	945,000,0 00	741	10,547,700, 000

<i>Perdagangan</i>						
Agricultural Sector <i>Sektor Usaha Pertanian</i>	2	30,000,000	1	20,000,000	3	50,000,000
Livestock Sector <i>Sektor Usaha Peternakan</i>	25	430,000,000	1	20,000,000	25	450,000,000
Plantation Sector <i>Sektor Usaha Perkebunan</i>	6	2,670,000,000	-	-	6	2,670,000,000
Fishery Sector <i>Sektor Usaha Perikanan</i>	24	396,500,000	3	70,000,000	27	455,500,000
Service Sector <i>Sektor Usaha Jasa</i>	249	3,877,000,000	4	120,000,000	253	3,997,000,000
Other Sector <i>Sektor Usaha Lainnya</i>	248	4,455,000,000	-	-	248	4,465,000,000
Partnership Development Fund <i>Dana Pembinaan Kemitraan</i>	-	-	-	-	-	-
Total	1530	25,080,200,000	63	1,485,000,000	1.593	26,565,200,000

Perdagangan 42 Mitra Binaan , Modal yang disalurkan Rp 945.000.000,00	Trading 42 Beneficiary-Partners, Funds disbursed Rp 945,000,000.00
Pertanian 1 Mitra Binaan , Modal yang disalurkan Rp 20.000.000,00	Agricultural 1 Beneficiary-Partners, Funds disbursed Rp 20,000,000.00
Peternakan 1 Mitra Binaan , Modal yang disalurkan Rp 20.000.000,00	Ranch 1 Beneficiary-Partners, Funds disbursed Rp 20,000,000,00
Perikanan 3 Mitra Binaan , Modal yang disalurkan Rp 70.000.000,00	Fisheries 3 Beneficiary-Partners, Funds disbursed Rp 70,000,000.00
Jasa 4 Mitra Binaan , Modal yang disalurkan Rp 120.000.000,00	Services 4 Beneficiary-Partners, Funds disbursed Rp 120,000,000.00
	Whereas funds distribution to the Community Development Program (BL) was

<p>Sedangkan penyaluran Program Bina Lingkungan (BL) sebesar Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk Bencana alam sebesar Rp7.500.000,00 dan untuk sarana ibadah sebesar Rp35.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Sedangkan penyaluran Program Bina Lingkungan (BL) sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk:</p> <p>Bencana alam sebesar Rp 7.500.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bantuan musibah banjir kepada karyawan jiwasraya pusat Rp7.000.000,00 <p>Sarana ibadah sebesar Rp35.000.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bantuan renovasi masjid di Pandeglang Rp15.000.000,- ✓ Bantuan renovasi majlis taklim di bekasi Rp10.000.000,- ✓ Bantuan renovasi Wihara Cengkareng Rp10.000.000,- <p>Sarana Kesehatan sebesar Rp50.000.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan Bangsal RS Jiwa di Jambi Rp50.000.000,- <p>Dalam Program Kemitraan tahun 2013, pemberian pinjaman dilaksanakan hanya sampai tanggal 02 April 2013 atas dasar Surat Edaran Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN no S-92/DB.MBU/2013 tanggal 03 April 2013 bahwa penyaluran pinjaman untuk program Kemitraan dihentikan sementara.</p> <p>AKSES INFORMASI</p> <p>Sebagai sarana komunikasi antara Jiwasraya dengan pemangku kepentingan, Perusahaan membuka akses informasi terkait perusahaan seperti laporan keuangan Perusahaan, informasi terkait dengan polis dan informasi lainnya yang dapat diakses secara langsung</p>	<p>Rp92.500.000, 00 (ninety two million five hundred thousand Rupiah), which was allocated for natural disasters as much as Rp7.500.000, 00 and to the worship places as much as Rp35.000.000, 00 with the following details:</p> <p>On the other hand, the distribution of the Community Development Program (BL) up to December 31, 2013, amounted to IDR92,500,000.00 (ninety two million five hundred thousand dollars) was allocated to:</p> <p>Natural disasters amounted to Rp7,500,00,.00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Donation was given to the employees of Jiwasraya who were the flood victims IDR7,000,000,00 <p>Worship places Rp35,000,000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Donation for mosque renovation in Pandeglang IDR15,000,000, - ✓ Donation for renovation of <i>majlis taklim</i> in Bekasi IDR10,000,000, - ✓ Donation for renovation of Vihara in Cengkareng IDR10,000,000 - <p>Health Facilities IDR50,000,000, 00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Construction of hall of the Psychiatric Hospital in Jambi IDR50,000,000, - <p>In the Partnership Program in 2013, the credit loan is given only up to April 2, 2013 based on the Circulation Letter of the Deputy for Restructuring and Strategic Planning of SOEs No S-92/DB.MBU/2013 dated April 3, 2013, that disbursement of credit loan to the Community Partnership program is paused.</p> <p>ACCESS OF INFORMATION</p> <p>As a medium for communication between Jiwasraya and its stakeholders, the Company provides open access to information about the Company such as the Company's financial statement, information about insurance policies and other information directly through the Company's website at http://www.jiwasraya.co.id. Jiwasraya also</p>
--	---

melalui website Perusahaan yaitu <http://www.jiwasraya.co.id>. Jiwasraya juga membuka Call Center di 500151 serta korespondensi yang dapat dilakukan melalui email asuransi@jiwasraya.co.id

Selain itu, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga menerbitkan majalah "Kabar Jiwasraya" yang disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan yang secara rutin dan didistribusikan secara cuma-cuma. Segala informasi terkait dengan produk, aktivitas perusahaan, serta informasi lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui para *stakeholders* dapat dilihat di Majalah Kabar Jiwasraya.

Jika diperlukan penyampaian informasi melalui informasi lainnya, Jiwasraya juga menggunakan media lainnya seperti talk show di radio, iklan media cetak dan audio visual, billboard, *wall sign* dan sebagainya. Sedangkan untuk komunikasi dan informasi internal Perusahaan, seluruh jajaran Jiwasraya dapat mendapatkan informasi perusahaan melalui majalah dinding, dan jaringan situs internal (corp mail, HCMIS).

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal Perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal Perusahaan. *Whistleblowing* merupakan salah satu sarana yang efektif guna mengungkap adanya pelanggaran-pelanggaran dalam operasional Perusahaan. Sebagaimana terdapat pada peraturan Bapepam Nomor: KEP-431/BL/2012, 1 Agustus 2012 mengenai penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik point G.13 perihal uraian sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), dimana Perusahaan diwajibkan melaporkan mengenai sistem pelaporan dan pengaduan pelanggaran Perusahaan.

provided Call Center at 500 151 as well as correspondence via email asuransi@jiwasraya.co.id

In addition, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) also publishes the magazine "Kabar Jiwasraya" which is disseminated to stakeholders on regularly free of charge. All information related to the products, the Company's activities, as well as other necessary information for stakeholders can be seen in Kabar Jiwasraya magazine.

If needed, information can be distributed by Jiwasraya through a number of media channels such as radio talk shows, print advertisement and audio-visual, billboards, wall sign and other types of communication. For internal communication and information dissemination, all officers of Jiwasraya can obtain information through the Company's bulletin board and the internal site network (corp mail, HCMIS).

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing system (grievance mechanism on violations) is a medium for communication for the internal parties of the Company to report the actions / behaviors / incidents related to fraud, violation of laws, company regulations, codes of conduct, and conflict of interest made by the Company's internal actors. Whistleblowing is one of the effective means to uncover irregularities in the Company's operations. As stated in the Regulation of Bapepam Number: KEP-431/BL/2012, August 1, 2012, about the submission of Annual Report of Publicly Listed Company, Article G.13 about violation reporting system (whistleblowing system), the Company is required to submit the reporting system and grievance mechanism of violations in the Company.

--	--